

GEMEENTE PROBOLINGGO 1918-1926**Ruli Muji Astutik**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-mail : ullyk_shi_amezaiko@yahoo.com**Septina Alriningrum**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Probolinggo mempunyai daerah *hinterland* yang subur sebagai salah satu penghasil komoditi perkebunan yang cukup besar di Jawa. Hal ini membawa dampak langsung pada kotanya. Jalan-jalan dirancang untuk mendukung ekspor hasil perkebunan ke Eropa melalui pelabuhannya. Hal ini menyebabkan perubahan besar dengan ditetapkan Probolinggo sebagai *gemeente* tahun 1918 di bawah pemerintahan kolonial Belanda, sehingga Probolinggo mengalami masa transisi dari kota tradisional ke kota modern. Masalah dalam penelitian ini adalah mengapa Probolinggo ditetapkan menjadi *gemeente* dan perkembangan Probolinggo masa *gemeente*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan *gemeente* Probolinggo didasarkan pada keistimewaan-keistimewaan Probolinggo diantaranya (1) potensi Pelabuhan Probolinggo sebagai sarana ekspor impor, (2) banyaknya penduduk asing dan (3) keberadaan pabrik gula. Perkembangan Probolinggo sebagai *gemeente* diantaranya (1) dipertahankannya alun-alun sebagai pusat kota, (2) meningkatnya upah kuli pabrik gula serta aktifitas ekspor dan impor Pelabuhan Probolinggo, (3) pembangunan sarana infrastruktur serta (4) penambahan penduduk yang ada melahirkan budaya baru dengan terbentuknya “masyarakat pendalungan”.

Kata kunci : Probolinggo, *Gemeente*, Perkembangan**Abstract**

Probolinggo has a fertile hinterland area as one of the commodities sizeable plantation in Java. The roads are designed to support the export of plantation products to Europe through the port. This led to major changes in Probolinggo defined as gemeente 1918 under Dutch colonial rule, so Probolinggo city in transition from a traditional to a modern city. The problem in this study was determined to be gemeente why Probolinggo Probolinggo and future developments gemeente. The results showed that based on the formation gemeente Probolinggo Probolinggo privileges include (1) the potential of the Port of Probolinggo as a means of export and import, (2) the number of foreign residents and (3) the presence of a sugar factory. Probolinggo development as gemeente including (1) maintenance of the square as the center of the city, (2) increasing wage laborers sugar mills and the export and import activities of the Port of Probolinggo, (3) development of infrastructure facilities, and (4) there is a growing population that gave birth to a new culture with formation of “community pendalungan”.

Keywords: Probolinggo, *Gemeente*, Development

PENDAHULUAN

Penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung hampir 350 tahun dan baru berakhir pada tahun 1942.¹ Selama penjajahannya, Kerajaan Belanda banyak menerapkan kebijakan-kebijakan guna mendukung praktek kolonialismenya di Hindia Belanda. Salah satu kebijakannya adalah dalam bidang pemerintahan, yaitu dikeluarkannya *Decentralisatie Wetgeving 1903* yang disebut juga sebagai desentralisasi lama dalam masa penjajahan Belanda.² *Decentralisatie Wetgeving 1903* menambah isi *Regering Reglement 1854* (RR) dengan tiga pasal baru (pasal 68a, 68b, 68c) yang memungkinkan pembentukan daerah yang mempunyai tata keuangan sendiri untuk membiayai kebutuhan daerahnya,³ sebagai *gewest, plaats atau gemeente*.

Pada tahun 1918 di Jawa telah terbentuk 16 buah *gemeente*. Salah satu diantaranya yaitu Probolinggo.⁴ Probolinggo menjadi salah satu kota Jawa Timur yang tata pemerintahannya berpola *gemeente* karena letak geografisnya tergolong berada di pesisir utara pulau Jawa. Dahulu Probolinggo lebih sering disebut dengan Banger.⁵ Istilah Banger sudah dikenal ketika Prabu Hayam Wuruk mengadakan perjalanan keliling daerah Lumajang dan Baremi⁶ pada tanggal 4 September 1359. Tanggal 4 September menjadi dasar penentuan hari jadi kota Probolinggo, karena pada saat itu Hayam Wuruk memerintahkan pembukaan hutan yang berada di sekitar sungai Banger untuk

memperluas daerah yang akan dijadikan pusat pemerintahan.⁷ Peristiwa itulah yang dijadikan dasar penetapan Hari Ulang Tahun (HUT) Probolinggo. Padahal hari jadi Probolinggo sebelumnya adalah 1 Juli karena masih berdasarkan pada keputusan *gemeente* dari *Staatsblad* no 322 tanggal 1 Juli 1918. Tetapi berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan walikota Probolinggo tidak setuju tanggal 1 Juli sebagai hari jadi karena bersifat Nerlandosentris.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, kota Probolinggo memiliki nilai sejarah kota yang panjang dan spesifik. Penetapan Probolinggo sebagai *gemeente* membawa dampak besar terhadap perkembangan Probolinggo sebagai kota kolonial. Perkembangan yang ada dapat terlihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu sosial, ekonomi budaya maupun sarana infrastruktur. Berdasarkan ketetapan status *gemeente* yang disandang Probolinggo, maka Probolinggo mulai mengalami perubahan dari kota tradisional kearah kota modern

METODE

Metode penelitian yang digunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.⁹ Sumber-sumber yang digunakan diantaranya; *Staatsblad van Nederlandsch Indie* no 322 tahun 1918, *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1920 no 424, *Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1918 no 323*, *Personalia en verdure gegeven betreffende de Suikerindustrie in Nederlands-Indie dan Personalia en verdure gegeven betreffende de Suikerindustrie in Nederlands-Indie, Verslag 1 van de kleine havens in Nederland Indie over het jaar 1923, Verslag (Spoor en tramwegwezen in*

¹ Bayu Surianingrat, 1980, *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*, (Jakarta:Aksara Baru), hlm.22

² Khairul Muluk, 2005, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, (Malang:Bayumedia Publishing), hlm.130

³ The Liang Gie, 1993, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty), hlm.15

⁴ *Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1918 no 322*

⁵ Istilah banger diambil dari nama sungai yang mengalir di Probolinggo, banger dalam bahasa Jawa berarti bau busuk yang khas

⁶ Nama desa yang ada di Probolinggo, sekarang menjadi Breml

⁷ Sejarah Kota Probolinggo dari Waktu ke Waktu yang diterbitkan Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo hlm 12

⁸ Masyarakat Probolinggo menolak sebab *gemeente* merupakan ciptaan Kolonialisme Belanda

⁹ Louis, Gootschalk. 1985. *Mengerti Sejarah, Pengantar Metode Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), hlm 32

Nederland-Indie, Statistisch jaaroverzicht van Nederland-Indie 7e jaargang 1924, dan foto-foto Probolinggo masa kolonial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pembentukan *Gemeente* Probolinggo

Pemerintah Kolonial tidak memberikan status *gemeente* (kotapraja) kepada semua daerah yang ada di Hindia Belanda. Status *gemeente* hanya diberikan kepada daerah-daerah yang memiliki keistimewaan khusus, seperti Surabaya. Selain daerah-daerah besar seperti Surabaya, daerah kecil juga mendapatkan predikat *gemeente*, contohnya Probolinggo.

Meskipun tampaknya ketetapan *gemeente* bagi Probolinggo terkesan bernuansa politis yang berpihak pada kepentingan orang kulit putih pada masa itu, namun sebenarnya dari sisi persyaratan berdirinya sebuah *gemeente*, Probolinggo dipandang sudah memenuhi syarat. Ada tiga macam faktor yang biasanya menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Hindia Belanda untuk menentukan berdirinya suatu *gemeente*, yaitu faktor keuangan, faktor penduduk, dan faktor keadaan setempat.¹⁰ Faktor keuangan umumnya sangat berkaitan dengan anggaran daerah yang dihasilkan dari kegiatan ekspor impor Pelabuhan Probolinggo. Probolinggo memiliki daerah *hinterland*¹¹ yang subur dengan dikelilingi pabrik-pabrik gula, sehingga banyak orang-orang Eropa yang bertempat tinggal di daerah ini. Untuk melengkapi aktifitas orang-orang Eropa, maka di Probolinggo dibangun beberapa sekolah sebagai sarana belajar bagi anak-anak orang Eropa serta penduduk pribumi. Apabila dicermati memang Probolinggo sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah *gemeente* dan telah mampu mengurus daerahnya sendiri.

Ada berbagai keistimewaan dari suatu daerah untuk ditetapkan menjadi sebuah

¹⁰ Eddy Supangkat, 2007, *Salatiga Sketsa Kota Lama*, (Salatiga:Griya Media), hlm.12

¹¹ *Hinterland* dapat diartikan sebagai daerah pedalaman atau daerah belakang yang merupakan daerah penyokong serta penyuplai kebutuhan

gemeente. Seperti halnya daerah-daerah lain di Hindia Belanda, Probolinggo akan ditetapkan menjadi sebuah kotapraja jika telah memenuhi beberapa syarat seperti keuangan, penduduk dan keadaan setempat. Semua syarat tersebut dapat dilihat dari beberapa potensi yang dimiliki oleh Probolinggo.

a. Pelabuhan sebagai Sarana Ekspor dan Impor

Berdasarkan ukuran besar kecilnya volume ekspor impor, pelabuhan-pelabuhan di Hindia Belanda dapat dibagi kedalam pelabuhan besar, pelabuhan industri kecil, dan pelabuhan kecil. Pelabuhan besar seperti Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Semarang, Tanjung Priok (Batavia), Cilacap, Belawan Deli (Medan), Emma Harbour (Padang) dan pelabuhan Makassar. Kategori pelabuhan industri kecil contohnya seperti pelabuhan Probolinggo, Pasuruan, Banyuwangi, Panarukan, Cirebon, Tegal dan Tanjung Benoa (Bali) sedangkan pelabuhan kecil adalah pelabuhan-pelabuhan di Hindia Belanda mencakup jumlahnya 450 pelabuhan selain yang telah disebut diatas.¹² Meskipun Pelabuhan di Probolinggo termasuk pelabuhan industri kecil, namun memiliki peranan yang cukup besar dalam sarana pengangkutan untuk wilayah timur Pulau Jawa. Dapat diamati dalam tabel di bawah ini aktifitas ekspor dan impor di pelabuhan Probolinggo dan sekitarnya :

Tabel 1: Kegiatan Impor barang-barang di Pelabuhan Probolinggo dan sekitarnya tahun 1921-1927

No	Thn	Kota			
		Prob	Pasuruan	Panarukan	Banyuwangi
1.	1921	3.838	3.013	2.915	729
2.	1922	1.540	1.491	1.486	234
3.	1923	1.197	880	1.836	124
4.	1924	1.187	745	1.305	155
5.	1925	1.562	1.150	1.926	219
6.	1926	4.318	1.038	2.390	477
7.	1927	9.177	985	2.126	344
Jumlah		22.819	9.302	13.984	2.282

Sumber : *Statistisch jaaroverzicht van Nederland-Indie (kolonien) jaargang 1926*, hlm. 242 dan

¹² *Hand book of Netherland East-Indie* dalam Nasution, 2006, *Ekonomi Surabaya pada Masa Kolonial 1830-1930* (Surabaya:Pustaka Intelektual), hlm.78

Verslag 1 van de kleine havens in Nederland Indie over het jaar 1923

Dari tabel diatas dapat kita amati kegiatan impor tahun 1921-1927 di wilayah Probolinggo merupakan jumlah terbesar jika dibandingkan dengan Pasuruan, Penarukan, dan Banyuwangi yaitu 22.819. Hal ini disebabkan penduduk di Probolinggo lebih padat daripada wilayah disekitarnya, sehingga mendorong Probolinggo lebih cepat berkembang daripada wilayah lainnya. Hal ini membuat pelabuhan Probolinggo harus mensuplai barang tambahan untuk kebutuhan penduduknya.

Tabel 2: Kegiatan Ekspor barang-barang di Pelabuhan Probolinggo dan sekitarnya tahun 1921-1927

No.	Thn	Kota			
		Prob	Psruan	Pnrukan	Bwi
1.	1921	39.447	22.597	19.020	7.707
2.	1922	28.532	16.900	18.581	5.799
3.	1923	43.234	34.295	24.449	6.418
4.	1924	46.005	36.193	30.596	5.964
5.	1925	36.941	29.918	29.851	9.221
6.	1926	31.727	27.656	25.009	8.821
7.	1927	32.358	25.242	24.815	4.460
Jumlah		258.244	192.801	172.321	48.390

Sumber : *Statistisch jaaroverzicht van Nederland-Indie (kolonien) jaargang 1926, hlm. 242 dan Verslag 1 van de kleine havens in Nederland Indie over het jaar 1923*

Tahun 1921-1927 jumlah ekspor di Pelabuhan Probolinggo jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah ekspor di daerah lain yaitu Pasuruan, Panarukan dan Banyuwangi yakni 258.244. Angka impor menunjukkan bahwa Pelabuhan Probolinggo lebih berpotensi sebagai sarana pengiriman barang daripada pelabuhan di wilayah lainnya. Padahal apabila kita cermati di sebelah barat Probolinggo, tepatnya di Pasuruan juga terdapat pelabuhan. Namun justru di pelabuhan Probolinggo yang memiliki aktifitas pengiriman barang yang lebih besar daripada pelabuhan-pelabuhan lain di ujung timur Pulau Jawa, sehingga Pelabuhan Probolinggo dijadikan sebagai pintu keluar masuknya komoditas perdagangan Belanda. Kondisi ini didukung dengan adanya infrastruktur yang memadai seperti adanya tram-tram dan kereta yang menuju langsung ke wilayah pelabuhan

dan jalan-jalan beraspal yang mempermudah pengangkutan barang. Dari analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa memang Pelabuhan Probolinggo memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekspor dan impor hasil-hasil bumi dari *afdeeling* Probolinggo maupun sekitarnya, sehingga Pelabuhan Probolinggo ditetapkan sebagai pelabuhan pantai¹³ berdasarkan *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1920 no 424.

b. Faktor Penduduk

Beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Hindia Belanda dalam memberikan predikat *gemeente* bagi Probolinggo diantaranya adalah faktor penduduk. Faktor penduduk yang dimaksudkan adalah faktor penduduk kulit putih. Seberapa besar prosentase penduduk kulit putih di daerah tersebut. Persyaratannya minimal terdapat 10% orang kulit putih yang bertempat tinggal di wilayah itu.¹⁴ Kulit putih dalam kriteria ini bukan hanya orang Belanda melainkan juga orang-orang Eropa non Belanda dan bangsa lain termasuk etnis Cina yang disejajarkan dengan orang Belanda.

Akhir tahun 1905 penduduk Probolinggo berjumlah 15.000 jiwa, terdiri dari 600 orang Eropa, 1.260 orang Cina, 350 orang Arab, dan sisanya sebagian besar adalah penduduk pribumi.¹⁵ Jadi ada sekitar 12,4 % penduduk kulit putih di Probolinggo. Dengan demikian dari faktor jumlah penduduk Probolinggo memang sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sebuah *gemeente*. Jumlah orang kulit putih di Probolinggo semakin bertambah banyak lagi setelah berdirinya *gemeente* Probolinggo. Tahun 1920 orang kulit putih di Probolinggo sudah mencapai 7.991 jiwa (termasuk etnis Cina).¹⁶ Perhatikan tabel dibawah ini sebagai

¹³ Pelabuhan pantai adalah pelabuhan yang disediakan untuk perdagangan dalam negeri sehingga tidak bebas disinggahi oleh kapal-kapal asing, kecuali telah meminta ijin terlebih dahulu. Dapat dilihat di Bambang Triatmodjo, 1996, *Pelabuhan*, (Yogyakarta:Beta Offset), hlm.3

¹⁴ Eddy Supangkat. *loc. cit.*,

¹⁵ Paulus.J. *loc. cit.*,

¹⁶ *Statistisch jaaroverzicht van Nederland Indie 7e jaargang 1924* hlm 11

perbandingan kepadatan penduduk beberapa daerah di Jawa Timur.

Tabel 3 : Hasil Sensus Penduduk Tahun 1920 di Jawa Timur

N o	Kota	Eropa	Pribumi	TA	Jumlah
1.	Pasuruan	2.222	560.987	6.991	570.200
2.	Prob	2.029	757.555	5.962	765.546
3.	Srby	18.932	794.577	29.292	843.101
4.	Bndowoso	1.026	549.126	4.654	554.806
5.	Malang	5.258	892.693	7.534	905.485
6.	Mojokerto	2.342	823.017	8.097	833.456

Sumber : *Statistisch jaaroverzicht van Nederland Indie 7e jaargang 1924* hlm 11

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Probolinggo menempati urutan keempat terbesar setelah Malang, Surabaya dan Mojokerto dengan jumlah penduduk 765.546 jiwa. Dengan demikian Probolinggo sudah layak untuk menyandang predikat *gemeente* pada tahun 1918.

c. Pabrik Gula Probolinggo

Awal abad ke-20 industri gula banyak berdiri di tengah puncak perekonomian dunia. Pada masa itu ada 179 pabrik-pabrik gula yang beroperasi di Jawa. Diantaranya di Jawa Timur ada 101 pabrik, di Jawa Tengah ada 67 pabrik, dan di Jawa Barat 11 Pabrik.¹⁷ Dari 179 pabrik yang beroperasi di Pulau Jawa, Jawa Timur merupakan daerah terbesar yang memiliki pabrik gula, 12 diantaranya terdapat di *afdeeling* Probolinggo. Ke-12 pabrik di Probolinggo yaitu pabrik gula Paiton, Kandang Djatie, Bagoe, Padjarakan, Maron, Gending, Djatiroto, Soekodono, Wonoaseh, Wonolangan, Oemboel, dan Soemberkareng. Semua pabrik gula tersebut tidak hanya berada di wilayah *afdeeling* Probolinggo, melainkan 3 pabrik masih termasuk wilayah Kabupaten Probolinggo, diantaranya Pabrik gula Oemboel, Soemberkareng dan Pabrik gula Wonoaseh. Oleh karena itu, tersebarnya pabrik gula ini mendukung bertambahnya penduduk asing yang bertempat tinggal di Probolinggo. Hal ini terjadi karena pada waktu itu gula merupakan

salah satu komoditas unggulan, sehingga banyak kalangan swasta yang tertarik terjun dalam industri ini. Namun dari 12 pabrik gula di *afdeeling* Probolinggo hanya beberapa pabrik yang masih aktif beroperasi sampai saat ini seperti pabrik gula Wonolangan dan Pajarakan.

2. Proses Menjadi *Gemeente* Probolinggo

Semua kota-kota kolonial di Hindia Belanda tidak ada satupun yang secara instan berubah menjadi kota modern, semuanya mengalami proses apalagi kota kecil seperti Probolinggo. Probolinggo yang awalnya hanya sebuah kota pelabuhan kecil melewati beberapa tahapan agar menjadi sebuah *gemeente*. Setelah syarat-syarat *gemeente* dimiliki serta semakin banyaknya penduduk Eropa yang mendiami Probolinggo maka semakin besar pula suara-suara agar secepatnya Probolinggo mendapat status *gemeente*, sehingga keluarlah peraturan yang menetapkan Probolinggo menjadi *gemeente*. Surat keputusan itu termuat dalam *Staatsblad van Nederland-Indie* no 322 tahun 1918 yang berbunyi :

De bepaling van het eerste lid van artikel 68a van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indie wordt toegepast op het gedeelte van het gewest Pasoeroean, uitmakende de hoofdplaats Probolinggo. Dit gebiedsdeel wordt genoemd : de gemeente Probolinggo. Voor de gemeente Probolinggo wordt uit de koloniale geldmiddelen afgezonderd eene som van f 28.123—(acht en twintig duizend een honderd drie en twintig gulden). . . . Deze ordonnantie treedt in werking met ingang van 1 Juli 1918.

(Ketentuan dari paragraf pertama pada pasal 68a *Regerings Reglement* mengenai kebijakan pemerintah *Nederland-Indie* diterapkan untuk bagian dari wilayah Pasuruan untuk membentuk ibukota Probolinggo. Wilayah ini disebut kota Probolinggo. Untuk kota Probolinggo dipisahkan dari kas kolonial sejumlah f 28.123 (dua puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga gulden). . . . Ordonansi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1918.)

Dengan keluarnya *staatsblad* tersebut menandakan bahwa Probolinggo telah keluar dari bagian Pasuruan dan secara resmi menjadi

¹⁷ Hadi Sucipto, 2004, *Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Industri Gula Pasuruan tahun 1930*, (Jurusan Pendidikan Sejarah FIS-UNESA), hlm.29

sebuah *gemeente*. Selanjutnya 1 Juli dijadikan sebagai hari jadi Probolinggo, namun karena dianggap berkaitan dengan nerlandosentris maka HUT Probolinggo diganti dengan tanggal lain. Status *gemeente* yang disandang Probolinggo membuat suatu perubahan dalam sistem pemerintahan. Pada awalnya Probolinggo berada di bawah pemerintahan pusat di Batavia, tetapi setelah ditetapkannya menjadi *gemeente* barulah Probolinggo mempunyai pemerintahan daerah sendiri. Pada hakikatnya pemerintahan *gemeente* dipegang seorang asisten residen, namun juga tetap menggunakan pejabat pribumi yaitu bupati untuk berhubungan langsung dengan rakyat. Oleh karena itu status *gemeente* membawa Probolinggo untuk memasuki babak baru sebagai kota modern.

B. Perkembangan *Gemeente* Probolinggo

a. Struktur tata kota Probolinggo

Probolinggo merupakan kota bentukan Belanda dimana semua penataan kotanya telah dibentuk oleh Belanda jauh sebelum menjadi *gemeente*. Semua pemukiman ditata sedemikian rupa berdasarkan penggolongan etnis, yaitu (1) permukiman orang Eropa di sebelah selatan dari alun-alun yakni di jalan *heerenstraat* (sekarang jalan suroyo) yang merupakan jalan utama kota, (2) permukiman orang Cina terletak di sepanjang *grotepostweg* dan di sekitar Sungai Banger, (3) permukiman orang Arab berada di *Arabische Wijk* (biasa disebut Kampung Arab sekarang jalan Dr. Wahidin) yang terletak di barat laut dari alun-alun Probolinggo, Sedangkan permukiman orang Melayu berada di sebelah barat (sekarang jalan Kartini), (4) permukiman orang pribumi di ujung sebelah timur dari permukiman orang Cina dan etnis Madura bermukim di sekitar laut Probolinggo. Pembagian permukiman tersebut karena adanya peraturan *wijkenstelsel* yang mengharuskan setiap golongan masyarakat dipisahkan berdasarkan etnis. Peraturan ini sangat memberatkan beberapa golongan terutama orang-orang Cina, karena mempersempit ruang gerak mereka dalam perdagangan. Namun, setelah *wijkenstelsel* dihapus serta dibentuknya *gemeente* bagi Probolinggo orang-orang Cina kembali bebas melakukan aktifitas perdagangan. Akan tetapi

bekas-bekas pembagian pemukiman masih sangat tampak.

Status sebagai *gemeente* membuat Probolinggo mulai berbenah diri dengan melakukan beberapa pembangunan infrastruktur, seperti listrik, pasar, sekolah, sarana keagamaan dan lain sebagainya. Berbagai penataan bangunan yang ada di Probolinggo seperti pemukiman dan beberapa bangunan lain serta statusnya sebagai *gemeente* tidak lantas mengurangi jati dirinya sebagai salah satu kota tradisional. Hal ini sangat berbeda dengan Surabaya dan Malang ketika menjadi *gemeente* banyak perubahan yang terjadi pada wajah kotanya. Perubahan yang sangat terlihat yakni pada pusat kota yang mengalami perpindahan. Pusat kota Malang berpindah dari alun-alun ke alun-alun bunder dengan bangunan gedung kotamadya yang megah dan terletak berdekatan dengan kompleks pemukiman orang Eropa yang dinamakan "*Gouverneur General Buurt*". Sedangkan pusat kota Surabaya dipindahkan dari daerah Jembatan Merah ke kompleks pemerintahan yang baru dengan gedung kotamadya yang megah, serta dilengkapi dengan pemukiman orang Eropa dengan nama daerah Ketabang.¹⁸ Namun sangat berbeda dengan Probolinggo dimana pusat kotanya masih tetap berada di alun-alun dengan dikelilingi bangunan pemerintahan, seperti kantor bupati dan kantor asisten residen yang tidak jauh dari selatan alun-alun. Penataan demikian membuat Probolinggo juga disebut "*Nieuwe Indische Stad*" Kota Hindia Belanda Baru,¹⁹ dimana letak pemerintahan pribumi yakni bupati diusahakan menjadi satu kawasan dengan pemerintahan Kolonial Belanda yaitu asisten residen.

Pada hakikatnya status *gemeente* bagi beberapa kota-kota di Hindia Belanda yakni memberikan kuasa untuk memerintah kotanya sendiri dalam berbagai bidang seperti pemerintahan maupun penataan kota. Oleh karena itu banyak *gemeente* seperti Surabaya dan Malang yang mendirikan pusat pemerintahan baru dengan gedung-gedung gaya arsitektur kolonial sebagai pusat kotanya

¹⁸ Handinoto, 2010, *Arsitektur dan Kota-kota di Jawa pada masa Kolonial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm.301

¹⁹ *Ibid.*, hlm:432

(bukan di sekitar alun-alun). Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan eksistensi kekuasaan pemerintah kolonial pada pusat kota yang baru dibangun. Selain itu, juga bertujuan untuk menunjukkan citra modern yang lepas dari pengaruh tradisional Jawa seperti alun-alun dan bangunan di sekitarnya. Akan tetapi konsep seperti itu tidak terjadi di Probolinggo. Meskipun Probolinggo menyandang status *gemeente*, namun untuk penataan kotanya masih dipengaruhi oleh unsur-unsur Jawa dengan alun-alun sebagai pusat kotanya. Perbedaan itu terjadi karena adanya faktor biaya yang tidak memungkinkan bagi Probolinggo untuk membangun gedung-gedung megah seperti di Surabaya dan Malang, sehingga tidak terjadi perpindahan pada letak pusat kotanya.

b. Administrasi *Gemeente* Probolinggo

Pada masa *gemeente* terjadi dualisme pemerintahan, karena pada waktu itu kewenangan mengurus *gemeente* dipegang oleh asisten residen sedangkan bupati sebagai penguasa tradisional masih tetap ada. Peran bupati dalam pemerintahan yaitu untuk berhubungan langsung dengan rakyat, sebaliknya wewenang asisten residen hanya untuk berhubungan dengan orang Eropa dan golongan Timur Asing. Dualisme pemerintahan nampak dalam tata politik dan tata administrasi. Adapun tugas bupati berdasarkan peraturan Pemerintah antara lain (1) mengawasi urusan-urusan seperti pertanian, peternakan, kesehatan, irigasi, pemeliharaan jalan dan pengumpulan hasil bumi (pajak) dari masyarakat pribumi, (2) Menjamin keamanan dan ketertiban sehingga memperkecil potensi keributan yang ditimbulkan dari masyarakat pribumi (3) Mengawasi urusan kepolisian.²⁰ Kedudukan bupati dalam pemerintahan sebagai “adik” dari asisten residen, dimana seorang bupati wajib memberikan nasehat kepada asisten residen dalam pengambilan suatu kebijakan. Disini asisten residen hanya mengawasi kinerja dari bupati dan menduduki jabatan tertinggi diatas bupati.

²⁰ Heather Sutherland, 1983, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, (Jakarta: Sinar Harapan), hlm.38

Pemerintahan *gemeente* dilengkapi dengan lembaga yang berperan sebagai dewan legislatif yakni *gemeenteraad*. *Gemeenteraad* merupakan dewan yang dibentuk untuk satuan-satuan daerah yang berstatus kota. Pembentukan *gemeenteraad* didasarkan dari keluarnya *Decentralisatie Besluit*.²¹ *Besluit* ini menentukan pokok-pokok tentang pembentukan, susunan, kedudukan dan wewenang Dewan dalam mengelola keuangan yang terpisah dari pusat.²² Menyusul dikeluarkannya *Desentralisatie Besluit* oleh Kerajaan Belanda, maka keluarlah aturan pelaksanaannya yaitu *Locale Raden Ordonnantie* (Peraturan tentang Dewan-dewan Daerah). *Locale Raden Ordonnantie* menentukan tentang struktur, status, kewenangan, dan pembentukan dewan-dewan termasuk *gemeenteraad* didalamnya.

Dalam pemerintahan, *gemeenteraad* berfungsi seperti lembaga legislatif yang mampu merepresentasikan perwakilan dari setiap golongan etnis di Probolinggo, yaitu golongan Eropa, Bumiputra, dan Timur Asing. Sayangnya sifat keanggotaan *gemeenteraad* tidak mencerminkan kuantitatif dari golongan etnis secara nyata, karena kenyataannya golongan Eropa lebih mendominasi keanggotaan *gemeenteraad*. Susunan *gemeenteraad* Probolinggo seperti yang tercantum dalam pasal 6 *staatsblad* no 322 tahun 1918 berikut : “*Voor de gemeente Probolinggo wordt ingesteld een raad, die genoemd wordt ; de gemeenteraad van Probolinggo. Het aantal leden van dien raad is 13. Hij is samengesteld uit 8 Europeanen of met hen gelijkgestelde personen, 4 Inlanders en 1 Vreemde Oosterling.*” (Untuk Probolinggo kota diatur sebuah dewan, yang disebut, dewan kota Probolinggo. Jumlah anggota dewan tersebut adalah 13. Mereka terdiri dari 8 orang Eropa, 4 pribumi dan 1

²¹ Soetandyo Wignjosebroto, 2005, *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940)*, (Malang: Bayumedia), hlm.20

²² Dann Sugandha, 1981, *Masalah otonomi serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. (Bandung:Sinar Baru), hlm.11

Orang Timur Asing). Adapun tugas *gemeenteraad* tercantum dalam pasal 6 *staatsblad* no 322 tahun 1918 berikut :

Onverminderd het daaronder bepaalde in het Reglement op het beleid der regeering van Nederlandsch indie, het Decentralisatie besluit en de Locale raden-ordonnaantie, omvat de werkring van den gemeenteraad na Probolinggo het bij artikel 4 omschreven behoeften. Bij twijfel of geschil over de grenzen van de bevoegdheid of de taak van de Regeering, van den gemeenteraad van Probolinggo, beslist de Gouverneur-generaal.

(Ketentuan yang berhubungan dengan peraturan tentang kebijakan pemerintah Nederland-Indie, yaitu keputusan Decentralisatie Besluit dan *Locale raden-ordonnaantie* tentang tugas dewan kota Probolinggo tercantum dalam pasal 4. Apabila ada perselisihan tentang batas-batas tugas dewan Probolinggo, maka diputuskan oleh Gubernur Jenderal).

Kutipan pasal 6 diatas tentang ketentuan tugas dari *gemeenteraad* yakni tercantum dalam pasal 4 yang juga berisi tentang tugas dari Pemerintah *Gemeente*. Hal ini menandakan bahwa tugas dari *gemeenteraad* adalah membantu pemerintah dalam mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dan wewenangnya seperti yang tercantum dalam pasal 4 *staatsblad* no 322 tahun 1918. Undang-undang tentang pembentukan *gemeenteraad* pertama kali pada tahun 1904 berdasarkan *Indische Staatsblad* 1904 No 459. Setahun kemudian pembentukan *gemeenteraad* baru terealisasi saat Batavia menjadi *gemeente* tahun 1905. Sedangkan di Probolinggo *gemeenteraad* baru dibentuk tahun 1918 ketika Probolinggo menyandang status *gemeente*.

Pembentukan *gemeente* membuat pemerintah daerah Probolinggo memperoleh hak untuk mengurus kota. Salah satu hak yang

diberikan kepada pemerintah *gemeente* yakni hak untuk memungut pajak. Pada masa *gemeente*, Probolinggo menetapkan pajak yang lebih murah dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga lebih menarik penduduk asing untuk pindah ke Probolinggo.²³ Beberapa kewenangan pemerintah *gemeente* Probolinggo yang tercantum dalam *staatsblad van Nederland indie* pasal 4 yang kemudian menjadi kewajiban *gemeente* antara lain :

- (1) Melakukan pemeliharaan, perbaikan, renovasi pembangunan jalan umum, taman-taman, dan tanaman di tepi jalan, membangun selokan, gorong-gorong, jembatan dan fasilitas publik lainnya;
- (2) Memberikan irigasi dan pengumpulan sampah di sepanjang jalan umum
- (3) Memberikan penerangan jalan untuk umum
- (4) Pemadam kebakaran
- (5) Mengatur pemakaman

Semua kewajiban tersebut dibebankan kepada pemerintah *gemeente* termasuk biaya yang harus ditanggung untuk keperluan tersebut. Padahal pemerintah *gemeente* Probolinggo tidak memiliki modal uang yang cukup, sedangkan pemerintah pusat hanya memberikan 28.123 gulden per tahunnya. Oleh karena itu, maka pemerintah *gemeente* atas nama sekretaris jenderal Hulshoff Pol membuat rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran tahun 1918 . Pengadaan rencana anggaran ini untuk memudahkan Probolinggo mengadakan pembangunan sebagai kota baru yang mulai belajar untuk mengatur kotanya sendiri. Selama 8 tahun masa *gemeente* berlangsung, maka tahun 1926 *gemeente* berubah menjadi *stadsgemeente* berdasarkan *Stadsgemeente Ordonnantie No. 365*. Perubahan yang terjadi karena pada waktu itu kinerja *gemeenteraad* (Dewan Kota atau dengan istilah lain DPR) belum secara maksimal²⁴ dimana penguasaannya masih berada di bawah *afdeeling*, sehingga tahun 1926 *gemeente* diubah menjadi *stadsgemeente*

²³ Pemkot Probolinggo, 1968, *Kenang-kenangan Setengah Abad Usia Kotamadya Probolinggo*, dokumentasi bagian Hukum Daerah Kota Probolinggo, hlm.56

²⁴ Van Der Wall, 2001, *Kenang-Kenangan Pangreh Praja Belanda 1920-1942*, (Jakarta: Djambatan), hlm.57

yang berarti penguasaannya berada langsung di bawah gubernur jenderal. Akan tetapi hal itu hanya bersifat sementara sebab *stadgemeente* diberi wewenang sepenuhnya untuk mengelola kota dan tidak lagi dipimpin seorang asisten residen dan bupati melainkan dipegang oleh *burgemeester* (walikota).

c. Infrastruktur Gemeente Probolinggo

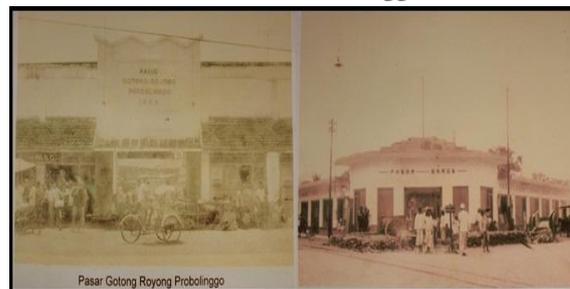
Sejak Probolinggo memasuki masa *gemeente*, maka pemerintah mempunyai program kerja berdasarkan tugas-tugas *gemeente* yang telah tercantum pada *staatsblad van Nederland-Indie* no 322 tahun 1918. Tugas-tugas yang dimaksud diantaranya yaitu, (1) Melakukan pemeliharaan, perbaikan, renovasi dan pembangunan jalan umum; (2) Membangun selokan, gorong-gorong, jembatan dan fasilitas publik lainnya; (3) Memberikan penerangan jalan untuk umum dan, (4) Mengatur pemakaman.

Pembangunan yang dilakukan diantaranya mendirikan kantor ANIEM tahun 1919 yang merupakan kantor listrik negara. ANIEM (*Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij*) merupakan salah satu perusahaan swasta yang mendapat hak untuk membangun dan mengelola sistem kelistrikan di Hindia Belanda.²⁵ Adanya kantor ANIEM berarti Probolinggo sudah memiliki listrik yang sangat berguna bagi aktifitas sehari-hari. Oleh karena itu, adanya kantor ANIEM memudahkan pemerintah daerah melayani kebutuhan publik terutama yang berkaitan dengan kebutuhan listrik dalam segala aspek kehidupan.

Fasilitas lain yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pasar. Pasar sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli berupa produk hasil bumi maupun barang yang lainnya. Jadi, tidak heran jika bangunan pasar menjadi kebutuhan masyarakat apalagi keberadaan pasar sangat mendukung dalam sektor perekonomian masyarakat. Gambar dibawah ini menampilkan sebuah pasar Probolinggo (gambar kiri) merupakan gambaran pasar jauh sebelum Probolinggo menjadi *gemeente* yakni tahun 1900'an, sedangkan gambar kanan merupakan gambar pasar ketika masa

gemeente. Dari gambar dibawah ini dapat dilihat bahwa pemerintahan *gemeente* telah berupaya memperbaiki pasar menjadi lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya.

Gambar 1. Pasar Probolinggo 1925



Sumber: Dispoppar Probolinggo

Perbaikan yang dilakukan Pemerintah kolonial mendorong pasar menjadi lebih layak untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat Probolinggo. Misalnya ketika hujan keadaan pasar semula becek karena hujan dan hanya sebagian lapak yang mempunyai atap, maka dengan adanya perbaikan pasar dari pemerintah kolonial yang memfasilitasi perbaikan atap bagi semua lapak. Pasar mempunyai peranan yang penting sebagai salah satu sumber penghasilan penduduk, sehingga perbaikan pasar perlu untuk dilakukan. Ada sekitar 4 pasar di Probolinggo, diantaranya (1) pasar baru yang mayoritas untuk kalangan Eropa dan Timur Asing berada di sepanjang *groteposweg* Probolinggo, (2) kawasan (pasar) pecinan di jalan Dr. Sutomo yang terletak di sepanjang sungai Banger, (3) pasar tradisional yang berdekatan dengan pelabuhan serta (4) di areal pemukiman pribumi sebelah timur Probolinggo. Selain memperbaiki pasar, pemerintah *gemeente* juga memperbaiki jalan-jalan di Probolinggo, seperti jalan yang berada di *grotepostweg* (jalan raya pos).

Untuk lebih meningkatkan perekonomian penduduk tahun 1924 tercatat pemerintah *gemeente* telah mendirikan beberapa pabrik diantaranya (1) sebuah pabrik bidang permesinan, (2) 2 pabrik bidang per-rel kereta api, (3) sebuah pabrik percetakan, (4) sebuah pabrik bangunan, (5) 11 pabrik penggilingan padi, (6) tiga pabrik teh, (7)

²⁵ Purnawan Basundoro, 2009, *Dua Kota Tiga Jaman*, (Yogyakarta: Ombak), hlm.90

sebelas pabrik kopi (coffee rubber)²⁶, (8) 9 pemadam kebakaran, dan (9) 4 pabrik es.²⁷

Meskipun harus diakui bahwa pembangunan fasilitas di Probolinggo lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan orang-orang kulit putih, namun tidak bisa diingkari orang-orang pribumi maupun orang Timur Asing ikut merasakan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak, misalnya saja pada waktu itu masyarakat Probolinggo sudah bisa menikmati jalan beraspal dan perbaikan pasar. Fasilitas seperti itu tentunya bukan hanya orang kulit putih saja, melainkan juga hampir seluruh lapisan masyarakat Probolinggo seperti pribumi dan orang-orang Cina. Dengan demikian secara bertahap pemerintah *gemeente* sudah menjalankan tugasnya dengan melakukan berbagai pembangunan di Probolinggo.

d. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Probolinggo

1. Pertambahan Penduduk *Gemeente* Probolinggo

Sejak pemerintahan *gemeente* maka secara perlahan Probolinggo mulai berkembang menjadi sebuah kotapraja yang semakin dikenal daerah lain. Hal ini seakan mengundang masyarakat di daerah sekitarnya seperti Madura untuk berpindah ke daerah yang dikenal sebagai kota pelabuhan. Biasanya perpindahan yang dilakukan dengan alasan untuk memperbaiki kesejahteraan dan mencari kehidupan yang lebih layak dibanding di daerah asal. Kondisi demikian akan memberikan dampak bagi pertambahan penduduk Probolinggo seperti yang tertera dibawah ini:

Tabel 4. Pertambahan Penduduk Probolinggo th 1905-1920

No	Penduduk	Tahun	
		Akhir 1905	1920
1.	Eropa	600	2.029
2.	Pribumi	12.790	757.555
3.	Timur Asing	2.210	5.962
	Jumlah	15.000	765.546

²⁶ coffee rubber merupakan pabrik dimana kopi belum dipisahkan dari kulitnya

²⁷ *Statistisch jaaroverzicht van Nedherland Indie 7e jaargang 1924 hlm 292-293*

Sumber : Paulus.J, 1917, *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie tweede Druk*, Martinus Nijhoff, S'Gravenhage, NV v/h E.J.Brill, Leiden, hlm 511 dan *Statistisch jaaroverzicht van Nedherland Indie 7e jaargang 1924* hlm 10-11

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Probolinggo mengalami pertambahan yang cukup pesat. Selain dari faktor natalitas, pertambahan penduduk yang terjadi juga dipengaruhi dari migrasi seperti yang dilakukan oleh masyarakat Madura. Persebaran orang Madura di ujung timur Jawa diantaranya terdapat 25 desa di Pasuruan, 3 desa di Probolinggo, 22 desa di Puger dan 1 desa di Panarukan.²⁸

Pertambahan penduduk bukan karena migrasi orang Madura saja, tetapi juga orang Eropa dan Timur Asing (Termasuk Cina). Apalagi sejak dicabutnya larangan membawa istri bagi orang-orang Eropa pada akhir abad ke-18 membuat semakin tingginya gelombang perpindahan orang kulit putih. Selain itu, pertambahan penduduk pun juga terjadi karena adanya migrasi orang-orang Timur Asing. Awal kedatangan (migrasi) orang-orang Timur Asing berkaitan dengan pertumbuhan jalur perdagangan melalui laut antara Tiongkok dengan Persia yang melalui kawasan Asia Tenggara. Hal ini membuat masyarakat Timur Asing di Hindia Belanda termasuk Probolinggo semakin bertambah. Akhir tahun 1905 penduduk Timur Asing hanya 2.210 jiwa, namun tahun 1920 bertambah lebih dari dua kali lipat menjadi 5.962 jiwa.

Banyaknya migrasi yang terjadi membuat pemukiman penduduk bertambah padat terutama di daerah Mayangan yang mayoritas merupakan penduduk migran dari Madura. Hal ini berakibat pada pemukiman penduduk yang semakin lama penuh sesak dengan banyaknya rumah yang dibangun. Daerah Mayangan menjadi padat penduduk sehingga antara rumah yang satu dengan lainnya berhimpitan dalam gang-gang kecil.

²⁸ Sri Margarana dan M.Nursam, 2010, *Kota-kota di Jawa (Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial)*, (Yogyakarta:Ombak), hlm.190

Hampir sebagian besar rumah tidak ada yang mempunyai halaman dan pagar pembatas. Bahkan ada sebagian penduduk yang terpaksa tinggal di sekitar areal rel kereta yang menuju ke Pelabuhan. Pemerintah *gemeente* berusaha memindahkan masyarakat migran ke pemukiman pribumi di sebelah timur kota (daerah Djatie) yang masih cukup luas untuk dijadikan pemukiman.

2. Kehidupan sosial budaya *Gemeente* Probolinggo

Sebagai kota baru bentukan Pemerintah Kolonial Belanda, maka masyarakat Probolinggo merupakan masyarakat heterogen yang memiliki stratifikasi sosial yaitu, golongan Eropa sebagai masyarakat dengan tingkatan tertinggi, golongan Cina dan warga Timur Asing, serta masyarakat pribumi sebagai tingkatan terendah. Adanya keragaman masyarakat ini menimbulkan interaksi sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi di Probolinggo tidak hanya terdiri dari kaum Jawa, namun sebagian besar merupakan imigran orang-orang Madura. Sebagai golongan yang sama-sama memiliki kedudukan terendah, maka intensitas hubungan antara kaum Jawa pribumi dengan kaum Madura lebih besar. Hubungan yang terjadi menimbulkan perpaduan budaya terutama dari segi bahasa. Orang Madura yang diidentik dengan bahasa asli Madura secara perlahan-lahan mulai membiasakan diri menggunakan bahasa Jawa mengikuti masyarakat pribumi Jawa. Walaupun logatnya terbilang lebih kasar namun bahasa Jawa yang diucapkan orang Madura cukup baik, sehingga orang Madura di

Kota	1923		1924		1925		1926		Rata-rata	
	V	M	V	M	V	M	V	m	V	M
Pasuruan	36	42	35	42	36	40	36	42	35,75	41,5
Prob	42	44	41	43	39	45	39	45	40,25	44,25
Malang	38	46	39	46	39	48	41	46	39,25	46,5
Besuki	37	43	37	43	37	42	36	43	36,75	42,75
Surabaya	35	48	34	46	34	46	34	47	34,25	46,75
Kediri	35	45	35	46	34	45	35	45	34,75	45,25
Nganjuk	36	42	37	43	36	43	37	44	36,5	43

daerah timur Jawa terutama Probolinggo juga disebut “masyarakat pendalangan”.

Masyarakat pribumi dengan tingkatan terendah mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan. Mata pencahariannya sebagai petani

yang menghasilkan bahan-bahan pangan membuat petani-petani Jawa harus berhubungan dengan pedagang Cina sebagai pedagang perantara. Pedagang Cina membeli bahan-bahan pangan dari petani Jawa yang selanjutnya dijual kembali kepada orang-orang Eropa. Hal ini berkaitan dengan keahlian orang Cina dalam tawar menawar, sehingga apabila petani Jawa menjual langsung kepada orang Eropa tentu harganya akan relatif lebih murah dibanding dengan harga jual kepada orang-orang Cina. Interaksi dagang antara petani Jawa dan pedagang Cina bisa disebut sebagai simbiosis mutualisme.

e. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Probolinggo

Berakhirnya sistem tanam paksa sebagai gerbang awal kelahiran liberalisme di Hindia Belanda. Masa liberalisme ditandai dengan banyaknya pihak swasta yang menyewa tanah untuk penanaman tebu dan pendirian pabrik pabrik gula hampir di seluruh daerah di Jawa, terutama Jawa Timur seperti Pasuruan dan Probolinggo. Pada masa liberalisme pabrik gula memegang peranan yang sangat penting. Tebu hanya akan berguna apabila diolah menjadi gula, sehingga untuk mempermudah pengangkutan tebu maka penanaman tebu sering mengelompok di sekitar pabrik milik pemborong swasta. Setelah tebu siap untuk dipanen petani mengangkutnya ke pabrik. Tugas petani hanya mengangkut tebu ke pabrik, sedangkan pengolahan tebu menjadi gula dilanjutkan oleh kuli yang ada di pabrik. Petani dibayar ketika tebu sudah menjadi gula, bukan berdasarkan tebu yang diangkut. Dengan demikian berarti keberadaan pabrik gula memberikan pengaruh yang signifikan bagi kehidupan ekonomi masyarakat pribumi khususnya petani dan kuli pabrik. Dapat diperhatikan pendapatan secara umum untuk upah buruh pabrik di Jawa serta upah kuli pabrik di Probolinggo masa *Gemeente*.

Tabel 9. Perbandingan Gaji Kuli di Pabrik Gula Jawa Timur (dalam sen)

Ket: v (vrouw=wanita) dan m (man=laki-laki)
 Sumber : *Department van Landbouw Nijverheid En Handel Centraal kantoort Voor de Statiestiek in Nederlandsch-Indie Jaargang 1927 Statiscat Abstract for the Nederlands*

*East-Indies year 1927 Landsdrukkerij
1928 Weltevreden hlm.294*

Pada masa pemerintahan *gemeente* gaji kuli pabrik di Probolinggo lebih besar jika dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini dapat diamati dari tabel diatas bahwa gaji kuli pabrik terutama kuli wanita di Probolinggo memiliki jumlah terbesar daripada daerah lainnya dengan rata-rata 40,25 sen. Namun jika dilihat dari tahun 1923 justru pendapatan kuli wanita mengalami penurunan yang awalnya sebesar 42 sen menjadi 39 sen di tahun 1926. Sedangkan untuk kuli laki-laki di Probolinggo menempati urutan keempat setelah Surabaya, Malang dan Kediri yaitu sebesar 44,25 sen. Pendapatan kuli laki-laki ini berbeda dengan kuli wanita yang mengalami penurunan dari tahun 1923-1926, justru pendapatan kuli laki-laki mengalami kenaikan walau hanya 1 sen yaitu di tahun 1923 sebesar 44 sen kemudian di tahun 1926 yaitu 45 sen. Dari perbandingan pendapatan kuli pabrik di Jawa Timur dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah *gemeente* Probolinggo berupaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pribuminya yang dapat diamati dari besar kecilnya gaji yang diterima oleh kuli pabrik gula.

PENUTUP

Simpulan

Probolinggo memiliki daerah *hinterland* yang subur dengan gunung Bromo dan Semeru yang berada di sebelah selatan. Hal ini menjadikan Probolinggo (1) kaya akan sumber daya alam terutama tebu. Keadaan demikian menarik perhatian (2) orang-orang Eropa dan Timur Asing lainnya untuk tinggal di Probolinggo sehingga semakin banyak orang-orang Eropa yang menetap di Probolinggo. Untuk menunjang aktifitas orang-orang Eropa maka banyak dibangun sekolah-sekolah seperti HIS (*Holland Inlandse School*), MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), Sekolah Guru Bumi Putera (*kweekschool*), sekolah Pamongpraja (*Opleidings School Voor Inheemse Ambtenaren* atau disingkat OSVIA). Keistimewaan lainnya di Jawa Timur hanya Probolinggo yang memiliki (3) *kweekschool* dan OSVIA. Berbagai sarana yang terdapat di Probolinggo inilah yang membuat Probolinggo ditetapkan menjadi sebuah *gemeente*

berdasarkan (1) *Staatsblad van Nederland Indie* Tahun 1918 No 322.

Ketika menyandang status *gemeente* Probolinggo mengalami beberapa perkembangan, namun tidak lantas mengurangi nilai-nilai tradisional Jawa meskipun mulai beranjak menjadi kota modern. Hal ini terlihat bahwa alun-alun sebagai pusat kota tradisional Jawa masih dipertahankan. Berbeda dengan kota-kota besar seperti Malang dan Surabaya dimana terjadi perpindahan pusat kota dari alun-alun ke daerah pemerintahan yang baru.

Masa *gemeente* membuat Probolinggo berbenah diri dengan melakukan berbagai pembangunan sarana infrastruktur seperti membangun jalan-jalan beraspal, mendirikan pasar, membangun sekolah dan mengelola pemakaman serta melengkapi Probolinggo dengan listrik. Dalam bidang ekonomi pemerintah *gemeente* berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan menaikkan upah kuli pabrik gula. Keadaan perekonomian masyarakat Probolinggo juga dapat diamati dari peningkatan aktifitas ekspor dan impor di Pelabuhan Probolinggo semenjak menjadi *gemeente*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam segi ekonomi masa *gemeente* sudah memberikan pengaruh yang cukup besar dengan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kemajuan yang ada mendorong terjadinya pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk ini menimbulkan kepadatan sehingga lahan pemukiman semakin sempit khususnya untuk pemukiman pribumi. Dengan bertambahnya penduduk maka pemerintah berusaha memindahkan sebagian penduduk ke timur Probolinggo yaitu di daerah Djatie agar menempati daerah yang lebih layak.

Selain itu pertambahan penduduk migran juga berpengaruh terhadap budaya masyarakat Probolinggo. Hal ini terlihat dari perpaduan budaya yang sangat mencolok yakni dengan adanya percampuran bahasa antara penduduk Jawa dengan migran Madura dan membentuk komunitas baru yang disebut "masyarakat pendalangan".

Saran

Pembangunan Probolinggo di masa sekarang dan yang akan datang supaya lebih memperhatikan peninggalan sejarah yang masih tersisa. Misalnya penghijauan yang berada di sumbu utama kota agar tetap terawat dengan baik dan tidak menghilangkan bangunan-bangunan kuno yang ada selama masih bisa dimanfaatkan, seperti gedung *kweekschool* yang sekarang berubah fungsi menjadi museum Probolinggo. Penulis juga berharap bagi putra daerah untuk ke depannya lebih menggali sejarah Probolinggo agar menumbuhkan rasa cinta dan bangga. Meskipun Probolinggo merupakan kota kecil namun memiliki nilai historis yang cukup bernilai dan jarang menjadi bahan penelitian bahkan tidak diketahui khususnya oleh putra daerah sendiri, seperti misalnya sejarah pabrik gula dan Pelabuhan Probolinggo.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1918 no 322

Statistisch jaaroverzicht van Nedherland Indie 7e jaargang 1924

Buku

Basundoro, Purnawan. 2009. *Dua Kota Tiga Jaman*. Yogyakarta: Ombak

Gie, The Liang. 1993. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta:Liberty

Goetschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah, Pengantar Metode Sejarah, terjemahan Nugroho Notokusanto*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Handinoto. 2010. *Arsitektur dan Kota-kota di Jawa pada masa Kolonial*. Yogyakarta:Graha Ilmu

Margarana, Sri dan M.Nursam. 2010. *Kota-kota di Jawa (Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial)*. Yogyakarta:Ombak

Muluk, Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang:Bayumedia Publishing

Nasution. 2006. *Ekonomi Surabaya pada Masa Kolonial 1830-1930* (Surabaya:Pustaka Intelektual)

Paulus.J. 1917. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie tweede Druk*, Martinus Nijhoff, S'Gravenhage, NV v/h E.J.Brill. Leiden

Pemkot Probolinggo, 1968, *Kenang-kenangan Setengah Abad Usia Kotamadya Probolinggo, dokumentasi bagian Hukum Daerah Kota Probolinggo*, Pemkot Probolinggo

Pemkot Probolinggo, 2010, *Sejarah Kota Probolinggo dari Waktu ke Waktu*.Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo

Sucipto,Hadi 2004. *Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Industri Gula Pasuruan tahun 1930*. Jurusan Pendidikan Sejarah FIS-UNESA

Sugandha, Dann. 1981. *Masalah otonomi serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Bandung:Sinar Baru

Supangkat, Eddy. 2007. *Salatiga Sketsa Kota Lama*, Salatiga:Griya Media

Surianingrat, Bayu. 1980. *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*. Jakarta:Aksara Baru

Sutherland, Heather. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan

Triatmodjo,Bambang. 1996. *Pelabuhan*. Yogyakarta:Beta Offset

Wall, Van Der. 2001. *Kenang-Kenangan Pangreh Praja Belanda 1920-1942*. Jakarta:Djambatan

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2005. *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940)*. Malang: Bayumedia